

Menjernihkan Pilkada Lampung 2020

HERTANTO

Dosen FISIP Universitas Lampung

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 di Lampung akan diselenggarakan di delapan kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Dari delapan pilkada tersebut, lima bakal calon petahana berasal dari para wakil kepala daerah lama, yaitu Nanang Ermanto (Plt Bupati Lamsel), Loekman Djojosoemarto (Bupati Lamteng), Zaiful Bokhari (Bupati Lamtim), Yusuf Kohar, dan Djohan. Sementara pilkada di Kabupaten Way Kanan, Pesawaran, dan Pesisir Barat tampaknya bakal calon petahana berasal dari bupati dan wakilnya, baik akan maju bersama berpasangan lagi ataupun saling bersaing sebagai lawan.

Pada tahap penjurian dan pencalonan di partai-partai politik saat ini, fenomena menarik Pilkada Lampung 2020 juga diwarnai oleh “kebangkitan” para bakal calon perempuan, sebutlah nama-nama yang sudah beredar di media massa seperti Eva Dwiana Herman (Kota Bandar Lampung), Anna Morinda (Kota Metro), Nesy Kalvia *Mustafa* (Kabupaten Lampung Tengah), Rina Marlina Bustami (Kabupaten Way Kanan), dan Erlina (petahana Wakil Bupati Pesisir Barat).

Ini merupakan perkembangan kuantitatif yang positif bagi politik lokal Lampung mengingat keterlibatan perempuan dalam politik praktis masih tergolong rendah. Sebagian mereka ingin meniru kisah sukses para istri kepala daerah atau mantan kepala daerah di daerah-daerah lain yang telah berhasil memenangkan pilkada. Terkecuali Anna Morinda yang punya rekam jejak politisi (Ketua DPC PDI-P Kota Metro dan mantan Ketua DPRD Kota Metro), tetapi suaminya bukan mantan kepala daerah. Ada juga Erlina yang merupakan bakal calon petahana wakil bupati Pesisir Barat.

Pilkada Lampung 2020 juga masih akan diwarnai politik kekerabatan dalam proses pencalonan di partai-partai politik. Nama-nama yang sudah beredar di media massa antara lain Ardito Wijaya (anak Wali Kota

Metro Pairin) yang diberitakan akan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil bupati Lampung Tengah. Ada juga Welly Adiwantara (menantu Pairin) yang mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil wali kota Metro.

Sempat pula beredar nama Erry Ayu-dhiansyah (suami dari Wakil Gubernur dan Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim) sebagai bakal calon bupati Lampung Timur. Adapun dari kerabat mantan kepala daerah yang muncul adalah Rycko Menoza (anak mantan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP), Frans Agung MP (anak mantan Bupati Tulangbawang Abdurrach-



Fenomena menarik Pilkada Lampung 2020 juga diwarnai oleh kebangkitan para bakal calon perempuan.

man Sarbini), dan Fritz Akhmad Nuzir (anak mantan Wali Kota Metro Lukman Hakim).

Penyelenggara Pilkada

Sukses-tidaknya penyelenggaraan Pilkada Lampung 2020 tak terlepas dari kualitas penyelenggara di tingkat badan *ad hoc*, mulai dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Saat ini tahapan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) sedang berlangsung di delapan daerah masing-masing. Pada tahap ini, rekrutmen penyelenggara di tiga level terbawah ini menjadi sangat penting.

Mereka ini perlu pembenahan serius karena di sinilah akar masalah perbaikan pemilu/pilkada. Menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP, 2015), bahwa sebagian besar penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi pemberhentian karena melanggar kode etik dan asas-asas penyelenggara pemilu adalah PPK, PPS, dan KPPS. Persentase sanksi pemberhentian anggota PPK mencapai 60% dan PPS sebanyak 29% dari seluruh jumlah pengaduan. Salah satu

persoalan mendasar yang terus berulang ada dalam tahap persiapan. Perlu diupayakan membentuk badan *ad hoc* yang kompeten, kapabel, integritas, dan independen, sehingga memberi pengaruh pada kinerja yang profesional dan akhirnya meningkatkan kualitas pemilu/pilkada.

Masalah yang berulang antara lain pada setiap pemilu/pilkada ke pemilu/pilkada yang menjadi penyelenggara adalah orang-orang yang sama atau petugas yang sama atau itu-itu saja. Hal ini makin kompleks dengan beratnya persyaratan sehingga mengurangi minat orang dan berimbas pada persoalan kompetensi dan integritas.

Akhirnya, anggota yang terjaring cenderung tidak berkualitas, termasuk yang sering disorot adalah rekrutmen PPS yang harus melalui usulan lurah atau kepala desa atau sebutan lain. Usulan PPS oleh pemerintah desa atau kelurahan banyak dikritik karena dianggap rawan tersusupi kepentingan calon dari partai yang sedang berkuasa atau petahana. Selain itu, juga adanya indikasi intervensi dalam penentuan penyelenggara tingkat desa.

Padahal, menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu/Pilkada, mereka dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, prosedur dan mekanisme perekrutan PPK, PPS, dan KPPS perlu ditingkatkan kualitasnya.

Pada akhirnya, proses elektoral Pilkada Lampung 2020 masih akan ditandai sejumlah fenomena umum seperti di daerah lainnya, yaitu maraknya dinasti politik, menguatnya oligarki parpol, kentalnya politik SARA, dan meningkatnya politik transaksional. Pilkada Lampung 2020 yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas politik dan demokrasi lokal masih terkendala berbagai persoalan penyimpangan yang terus berulang. Inilah potret buram Pilkada Lampung 2020 yang perlu dijernihkan. ■